

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Asshiddiqie Jimly, 2006 Perihal Undang-Undang, Konstitusi Press Dan Pt Syaami Cipta Media, Jakarta
- Mas'ood Mohtar, 2016, Perbandingan Sistem Politik, Cetakan Ke-16, Universitas Gadjah Mada Press, Yogyakarta
- Admosudirjo Prajudi, 1998, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Asmak Ul Hosnah, Dwi Seno Wijanarko Dan Hotma P. Sibuea, 2021, Karakteristik Ilmu Hukum Dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Pt. Rajagrafindo Persada, Depok,
- Asshiddiqie Jimly, 2017, Perihal Undang Undang, Rajawali Pers, Depok
- Fadjar Mukthie, 2004, Tipe Negara Hukum, Malang, Bayumedia Publishing
- Ganjong, 2007, Pemerintah Daerah Kajian Politik dan Hukum, Galia Indonesia, Bogor.
- Guru Pinandita, Padmo Wahyono, 1984, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta
- Helmi, 2012, Hukum Perizinan Lingkungan
- Indroharto, 2002, Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Isretno Israhadi Evita, 2016, Hukum Administrasi Negara Pengantar Kajian tentang Kewenangan & Kebijakan Pemerintah, Cintya Press, Jakarta,
- Marzuki Peter Mahmud, 2014 Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi, Kencana Pranadamedia Groub, Jakarta
- Ogiandahafiz Juanda, Juanda, 2022, Filsafat Hukum Indonesia Konsep Pembangunan Sistem Hukum Nasional, Rajawali Pers, Depok
- Rahardjo Satjipto, 2004, Ilmu Hukum, Pt Citra Aditya, Bandung,
- Ridwan Hr, 2010, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Press, Jakarta,
- Soeprapto Maria Farida Indrati, 2007, Ilmu Perundang-Undangan, Kanisius, Yogyakarta, 2007

Sulaiman King Faisal, 2017, *Teori Peraturan Perundang-Undangan Dan Aspek Pengujiannya*, Thafa Media, Yogyakarta

Sutedi Adrian, (2011) *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Cetakan Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta

Utrecht, 1962, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta

Yamin Muhammad Yamin, 1982, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Yulianto Ahmad dan Mukti Fajar 2014, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

B. JURNAL

Al afghani Muhammad Mova. (2021), *Konsep Regulasi Berbasis Risiko Telaah Kritis dalam Penerapannya pada Undang-Undang Cipta Kerja*, Jurnal Konstitusi, Vol. 18.

Andina Elok Puri Maharani, Verido Dwiki Herdhianto & Sunny Ummul Firdaus. (2022) *Omnibus Law Dalam Kerangka Prinsip- Prinsip Legalitas*, Jurnal Inovasi Penelitian, Vol. 2,10

Anik Iftitah, Weppy Susetiyo, *Peranan Dan Tanggungjawab Pemerintah Dalam Pelayanan Kesehatan Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja*, Jurnal Supremasi, Volume 11, Nomor 2, Tahun 2021, hlm. 94

Dina Haryati Sukardi, Dwi Nurahman, SD Fuji Lestari H, Muhadi. (2022), *“Optimalisasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Dalam Peningkatan Perekonomian Daerah Melalui Umkm”* Jurnal Pengabdian UMKM, vol.1.1

Eka Sakti. (2021) *“Reformasi Birokrasi Bidang Perizinan Penyelenggaraan Telekomunikasi Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Sistem OSS)”*, Dharmasisya” Jurnal Program Magister Hukum FHUI: Vol. 1, Article 28

H. Riyanto. (2020), *Pembaruan Hukum Nasional Era 4.0*, Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol 9,2

Ima Mayasari. (2020) *“Kebijakan Reformasi Regulasi Melalui Implementasi Omnibus Law Di Indonesia”*, Jurnal Rechts vinding Volume 9 Nomor 1

- Irna Nurhayati et.al.(2019), Pendaftaran badan usaha secara elektronik pasca diterbitkannya peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Jurnal Negara Hukum, Vol.10, 2
- Juanda Enju. (2017), Hukum dan Kekuasaan, Jurnal Ilmiah Galuh Jusitisi, Vol 5,2
- Erni, Febri Jaya. (2022), Efektifitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dalam Rangka Kemudahan Berusaha, Jurnal Wajah Hukum, Volume 6 No.2
- M. Hadjon Philipus. (1997) Tentang Wewenang, Jurnal Yuridika, Volume No.5 & 6, Tahun XII,
- M. I. F. Assegaf, H. Juliani, & N. Sa'adah. (2019) Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) Dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah, Diponegoro Law Journal, Vol 8,2
- M. Ikhwan Rays, Moh. Rizky A. Jumadil, Rahmat Setiawan, Mustating Daeng Maroa, Asis Harianto, , “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha”, Jurnal Yustisiabel, Volume 7 Nomor 1 April 2023
- Muchamad Wajihuddin, Teguh Setiadi, Edi Rohaedi. (2020),Penerbitan Permohonan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Online Single Submission, Volume 07, Nomor 01
- Nyoman Serikat Putra Jaya, Melani dan Hari Sutra Disemadi. (2020) :Kebijakan Hukum Pidana Dibidang Transaksi Elektronik sebagai Tindak Pidana Non-Konvensional”, Jurnal Pandecta, Volume 15. Number 1.
- RM. Hasbi Pratama Arya Agung. (2021) “Perlindungan Data Pribadi Dalam Proses Pengurusan Perizinan Perusahaan Berbasis Elektronik Online Single Submission (OSS)”, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Fakultas Hukum Universitas Galuh, Volume 9 Nomor 1
- Rusmanto Wieky. 2017, “Evaluasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kota / Kabupaten Di Wilayah Provinsi Jawa Barat”, Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi (JIMIA) No.2 Tahun XI
- S. Al Huzni, & Y. A. Susanto.(2021), Pelaksanaan Izin Usaha Secara Elektronik Sebagai Upaya Peningkatan Investasi Di Indonesia, Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan, Vol 15,1.

Sri Isriawaty Fheriyal , Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Volume 3, 2015, hlm. 7

Syafrudin Ateng. (2000), “Menuju Penyekenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab”, Jurnal Pro Justisia, Edisi IV .

Winda Fitri dan Sheerleen Sheerleen. (2021) “Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik: Suatu Kajian Perspektif Hukum Di Indonesia”, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 7(2)

C. PERATURAN HUKUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Undang Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Peraturan Wali Kota nomor 52 A tahun 2021 tentang *Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*

Peraturan Wali Kota Bekasi nomor 117 tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi

Http//

https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf

November 2022

tanggal 12